

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama sedekade terakhir, Tiongkok telah bertransformasi menjadi salah satu negara adidaya yang bersanding bersama Amerika Serikat (AS) dalam dunia internasional.¹ Secara otomatis, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok akan mempengaruhi stabilitas dunia internasional. Salah satu kebijakan luar negeri yang paling banyak menyita perhatian sejak inisiasinya sampai saat ini, adalah kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)*.²

Bersama dengan rezim baru pemerintahan Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, Tiongkok kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi ambisius yang berfokus untuk meningkatkan perdagangan global, pembangunan infrastruktur, serta investasi skala besar dengan membentuk jalur ekonomi sutra modern yang menghubungkan 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. BRI sendiri terdiri dari 2 komponen utama yaitu, *The Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*. *The Silk Road Economic Belt* berfungsi sebagai jalur darat yang menghubungkan daerah tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Timur Tengah. Sedangkan, *21st Century Maritime Silk Road* berfungsi sebagai jalur laut yang menghubungkan daerah pesisir Tiongkok dengan Asia Tenggara dan Afrika. Berdasarkan data dari World Bank pada tahun 2019, Tiongkok

¹ Suisheng Zhao, "The US–China Rivalry in the Emerging Bipolar World: Hostility, Alignment, and Power Balance", *Journal of Contemporary China*, Vol. 31, Issue. 134, 2022.

² Kevin Cai, "China's Foreign Policy Adjustment Under Xi Jinping", *Journal China's World*, Vol. 2, No. 2, 2016.

bersama 65 negara lain yang tergabung dalam proyek besar BRI telah memegang 30% GDP dunia, 62% populasi, serta 75% sumber energi.³

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Tiongkok kerap menggunakan instrumen *soft power* yang terkesan ramah dan murah hati seperti kerja sama, bantuan luar negeri, investasi, dan perdagangan. Melalui BRI, Tiongkok telah menjalin berbagai kerja sama serta memberikan bantuan luar negeri skala besar ke negara-negara mitranya, termasuk Kamboja.⁴ Menjadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara serta masih berorientasi pada kekuatan militer membuat Kamboja tidak bisa berdiri sendiri dan harus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk *survive* dalam dunia internasional. Kamboja memiliki banyak permasalahan internal negara seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan distribusi pendapatan, korupsi, banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Kompleksnya permasalahan internal yang dimiliki Kamboja, membuatnya membutuhkan partner adidaya yang mampu memberikan bantuan serta mendukungnya secara penuh seperti, Tiongkok.⁵

Hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Kamboja sudah terjalin selama ratusan tahun serta banyak peninggalan sejarah yang membuktikannya. Sejak awal kemerdekaan, Tiongkok telah menjadi negara yang menyokong Kamboja dengan berbagai bantuan luar negerinya.⁶ Bagi Kamboja yang tengah

³ Peter Cai, “*Understanding China’s Belt and Road Initiative*”, Lowy Institute For International Policy, Vol. 2, No. 3, 2016.

⁴ Sara Lengauer, “*China’s foreign aid policy: Motive and method*”, The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol. 9, No. 2, 2011.

⁵ USC US-China Institute, “*What China’s Belt and Road Initiative Means For Cambodia*”, diakses melalui [What China’s Belt And Road Initiative Means For Cambodia | US-China Institute \(usc.edu\)](https://www.usc.edu/what-china-s-belt-and-road-initiative-means-for-cambodia) pada 25 Maret 2023.

⁶ Phou Sambath, “*Cambodia-China Relations: Past, Present and Future*”, IIMBA, Vol. 2, No. 2, 2008.

berupaya bangkit secara ekonomi tentu saja BRI adalah sebuah peluang yang menguntungkan. Pasca diperkenalkannya BRI ke publik, Kamboja telah menunjukkan antusiasmenya yang menandakan bahwa Kamboja akan ikut serta dalam proyek besar ini. Dengan bermitra bersama Tiongkok berbagai pembangunan infrastruktur Kamboja dinilai akan menjadi lebih cepat dan juga akan meningkatkan skala *Foreign Direct Investment (FDI)* yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Kamboja di masa depan.⁷

Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ) merupakan sebuah zona ekonomi khusus hasil kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Kamboja dibawah kerangka kebijakan BRI yang diinisiasi pada tahun 2019. Secara geografis, Sihanoukville adalah kota terbesar kedua setelah Phnom Penh yang terletak di pesisir selatan Kamboja serta berbatasan langsung dengan Teluk Thailand dan Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan, untuk penamaan Sihanoukville sendiri berasal dari nama raja Kamboja yaitu, Norodom Sihanouk.⁸

Sebelum adanya inisiasi SSEZ dalam skema BRI, Sihanoukville hanyalah sebuah kota sepi yang miskin namun, berkat investasi Tiongkok kini atmosfer kehidupan di Kota Sihanoukville telah dihiasi dengan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Sihanoukville-Phnom Phen, *Golden Silver Gulf Resort* sebagai destinasi wisata terbesar kedua setelah Angkor Wat, Pelabuhan Otonomi Sihanoukville, Bandara Internasional Sihanoukville, hotel, perumahan elit, restaurant mewah, perusahaan manufaktur, kasino, dan Pangkalan Angkatan

⁷ Heng Pheakdey, "Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31, Issue. 2, 2012.

⁸ Tom Alexander Bühler, "Development in Sihanoukville under Chinese influence", Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019.

Laut Ream Sihanoukville. Sehingga, Sihanoukville dijuluki sebagai Las Vegas dan Macau versi kedua.⁹

Berdasarkan data dari Dewan Pembangunan Kamboja (*The Council for the Development of Cambodia/CDC*) bantuan luar negeri Tiongkok di SSEZ terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun bahkan, saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2018-2019, Kamboja telah menyerap bantuan Tiongkok sekitar US\$1,39 miliar dan naik lagi pada tahun 2020-2021 menjadi US\$2,32 miliar. Dari pihak Tiongkok sendiri sudah menyanggupi untuk menyediakan bantuan sebesar US\$5 miliar per tahun bagi pembangunan Kamboja, terutama pembangunan di SSEZ.¹⁰

Peningkatan hubungan kerjasama Tiongkok dan Kamboja di SSEZ telah menimbulkan kekhawatiran internasional sejak Tiongkok tanpa henti memberikan bantuan luar negeri skala besar terhitung dari 2019 sampai sekarang.¹¹ Salah satu peningkatan kerja sama Tiongkok dan Kamboja di SSEZ yang paling disorot adalah dalam bidang keamanan yaitu, penandatanganan *Mou Cambodia-China Defense Treaty* serta pembangunan kembali Pangkalan Laut Ream Sihanoukville yang letaknya dekat dengan sumber konflik, Laut Tiongkok Selatan. Penandatanganan *Mou Cambodia-China Defense Treaty* serta kehadiran bantuan luar negeri Tiongkok pada Pangkalan Angkatan Laut Ream Sihanoukville menuai berbagai spekulasi negatif, terutama dari AS dan negara ASEAN. Isu Laut

⁹ Tom Alexander Bühler, *“Development in Sihanoukville under Chinese influence”*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019.

¹⁰ China’s White Paper, *“China’s International Development Cooperation in the New Era”*, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2021.

¹¹ Tom Alexander Bühler, *“Development in Sihanoukville under Chinese influence”*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019.

Tiongkok Selatan merupakan isu yang sangat sensitif di tengah rivalitas Tiongkok dan AS di Asia Tenggara.¹²

Filipina dan Vietnam sebagai dua negara yang bersengketa dengan Tiongkok terkait klaim Laut Tiongkok Selatan menuding Kamboja sebagai negara boneka Tiongkok karena sikap Kamboja cenderung selalu berusaha memihak Tiongkok dengan mengeluarkan pernyataan yang menguntungkan Tiongkok seperti, mengatakan bahwa isu Laut Tiongkok Selatan bukan merupakan isu yang signifikan untuk dibahas dalam forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-45 di Phnom Penh pada 17 Februari 2022.¹³

Menanggapi berbagai spekulasi negatif tersebut, pemerintah Tiongkok dan pemerintah Kamboja masing-masing mengeluarkan pernyataan resmi melalui konferensi pers Kementerian Luar Negerinya. Tiongkok dengan tegas menyatakan bahwa bantuan skala besarnya di SSEZ hanya sebuah bentuk kerjasama bilateral biasa dan tidak sedang membangun propaganda disana, AS dan negara ASEAN lainnya juga dinilai tidak memiliki hak untuk menuding serta mencampuri urusan kerjasama yang sah antara dua negara.¹⁴ Dari pihak Kamboja juga dengan tegas menyatakan bahwa inisiasi SSEZ hanya sebuah bentuk kemitraan bilateral dalam kerangka BRI, sama seperti yang diinisiasi Tiongkok di negara lain. Terkait bantuan pembangunan kembali Pangkalan Angkatan Laut Ream Sihanoukville, juga merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas Angkatan Laut Kamboja dalam melindungi kedaulatan negara dan untuk memberantas kejahatan maritim,

¹² Chyungly Lee and Vincent Wang, *“ASEAN and Recent Tensions in the South China Sea”*, University of Richmond, 2014.

¹³ Donald Emmerson, *“ASEAN: between China and America”*, Institute for East Asian Studies, Sogang University, Vol. 5, No. 1, 2017.

¹⁴ Bloomberg, *“Cambodia Denies Report China Building Secret Naval Facility”*, 2022, diakses melalui [Cambodia Denies Report China Building Secret Naval Facility - Bloomberg](#) pada 5 September 2023.

sesuai dengan konstitusi Kamboja yang tidak mengizinkan adanya pangkalan militer asing di negaranya.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melihat bahwa dalam pemberian bantuan luar negeri Tiongkok kepada Kamboja dan inisiasi SSEZ memiliki kepentingan tersendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana Tiongkok secara konsisten mendukung pembangunan Kamboja dengan memberikan bantuan luar negeri terutama, di SSEZ bahkan, saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti apa saja kepentingan yang ingin dicapai Tiongkok melalui pemberian bantuan luar negerinya di SSEZ.

1.2 Rumusan Masalah

Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ) merupakan zona ekonomi khusus hasil kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Kamboja dalam kerangka kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)*. Bantuan luar negeri skala besar yang dialokasikan Tiongkok di SSEZ telah berhasil mengubah seluruh atmosfer kehidupan di kawasan tersebut dengan berbagai pembangunan. Tiongkok mendanai pembangunan jalan tol Sihanoukville-Phnom Phen, Pelabuhan Sihanoukville, Bandara Sihanoukville, *Golden Silver Gulf Resort* sebagai pariwisata terbesar kedua setelah Angkor Wat, perusahaan manufaktur, hotel, perumahan elit, restoran mewah, kasino, serta Pangkalan Angkatan Laut Ream Sihanoukville yang telah menimbulkan kekhawatiran internasional karena letaknya dekat dengan Laut Tiongkok Selatan yang merupakan sumber konflik antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN selama beberapa tahun terakhir.

¹⁵ Bloomberg, “*Cambodia Denies Report China Building Secret Naval Facility*”, 2022, diakses melalui [Cambodia Denies Report China Building Secret Naval Facility - Bloomberg](#) pada 5 September 2023.

Pada tahun 2019, dunia internasional sedang dihebohkan dengan fenomena Covid-19 namun, inisiasi dan pembangunan di SSEZ tetap berjalan stabil karena dukungan kuat dari pihak Tiongkok terhadap Kamboja. Oleh karena itu, bantuan luar negeri Tiongkok melalui SSEZ dinilai sebagai instrumen untuk mencapai berbagai kepentingannya di Kamboja dan Asia Tenggara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu, “apa kepentingan Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait apa kepentingan Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa khususnya dalam memahami kepentingan dari bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional terkait bantuan luar negeri negara adidaya kepada negara berkembang.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan pengkajian terhadap lima literatur yang memiliki pembahasan serupa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait topik yang dibahas.

Literatur pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sigit Candra Wiranata Kusuma dengan judul *China-Cambodia Relationships: Phnom Penh as Beijing's Permanent Client State*. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan BRI serta bagaimana hubungan antara Tiongkok dan Kamboja dengan menggunakan variabel sejarah (historis).¹⁶

Meskipun, Tiongkok dan Kamboja tidak berbatasan darat secara langsung namun, kedekatan kedua negara ini tidak perlu diragukan lagi. Hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Kamboja sudah terjalin selama ratusan tahun dan banyak peninggalan sejarah yang membuktikannya. Pasca keikutsertaan Kamboja dalam BRI, semakin terlihat bahwa hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Kamboja kian mengerat, kedua negara terus melakukan kerjasama yang saling menguntungkan demi mencapai kepentingan nasional masing-masing.

¹⁶ Wiranata Kusuma, "*China-Cambodia Relationships: Phnom Penh as Beijing's Permanent Client State*", Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Vol. 3, No .2, 2019.

Kerangka kerjasama Tiongkok dan Kamboja di bawah BRI, memberi ruang bagi Kamboja untuk berkembang secara ekonomi melalui investasi serta pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok. Sedangkan bagi Tiongkok, ini adalah peluang besar untuk memasuki pasar Asia Tenggara dan Kamboja akan terus menjadi negara mitra permanen Tiongkok yang akan memberikan dukungannya di forum internasional. Pada forum pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang ke-45 di Phnom Penh, Kamboja ikut buka suara terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan serta menunjukkan posisinya sebagai negara pendukung Tiongkok.¹⁷

Negara *client* adalah kondisi dimana suatu negara yang secara ekonomi, politik, dan militer berada dibawah negara lain. Negara *client* akan menerima bantuan penuh dari negara adidaya namun, harus bersedia membayar patronasi tersebut melalui dukungan diplomatik. Para kritikus berpendapat bahwa penggambaran Kamboja sebagai *client state* dapat terlihat melalui para pejabat Kamboja yang memihak Tiongkok dalam beberapa forum internasional seolah para pejabat Kamboja berbicara bukan untuk kepentingan negara mereka sendiri melainkan sebagai boneka Tiongkok.¹⁸

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk melihat bagaimana dinamika hubungan antara Tiongkok dan Kamboja yang telah terjalin sejak lama. Tulisan ini juga memaparkan kondisi Kamboja sebagai negara berkembang yang masih membutuhkan sokongan dari negara adidaya seperti,

¹⁷ Wiranata Kusuma, "China-Cambodia Relationships: Phnom Penh as Beijing's Permanent Client State", Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Vol. 3, No .2, 2019.

¹⁸ Wiranata Kusuma, "China-Cambodia Relationships: Phnom Penh as Beijing's Permanent Client State", Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Vol. 3, No .2, 2019.

Tiongkok. Hubungan persahabatan Tiongkok dan Kamboja berubah menjadi hubungan kerjasama intensif setelah inisiasi kebijakan BRI serta status Kamboja dinilai perlahan mulai bergeser menjadi negara *permanent client* bagi Tiongkok.

Literatur kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sovinda Po dan Kim Kong Heng yang berjudul *Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province*. Artikel jurnal ini mencoba mengkaji tentang dampak positif dan negatif dari investasi Tiongkok bagi negara penerimanya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, serta lingkungan.¹⁹

Beberapa tahun terakhir sejak inisiasi BRI, terjadi lonjakan arus investasi dari Tiongkok ke Kamboja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek-Proyek investasi Tiongkok yang sebelumnya berpusat di Ibu Kota Kamboja, Phnom Phen dialihkan ke Sihanoukville, sebuah kota provinsi di pesisir Kamboja. Sihanoukville dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Teluk Thailand dan Laut Tiongkok Selatan serta memiliki pelabuhan dan bandara yang akan mempermudah mobilitas. Tiongkok bersama investasinya telah berhasil mengubah atmosfer kehidupan di Sihanoukville dengan berbagai pembangunan.²⁰

Dalam bidang ekonomi, kehadiran investasi Tiongkok telah berhasil menaikkan status Kamboja dari negara miskin menjadi negara pendapatan menengah ke bawah. Dalam kasus Sihanoukville, Tiongkok berfokus kepada pembangunan infrastruktur serta sektor *real estate* seperti jalan tol, pelabuhan,

¹⁹ Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal, Vol.19, No. 4, 2019.

²⁰ Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal, Vol.19, No. 4, 2019.

bandara, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, perumahan elit, *resort*, dan kasino. Pembangunan besar-besaran ini telah berhasil mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal Kamboja. Namun, kehadiran investasi Tiongkok di Sihanoukville juga menimbulkan lonjakan jumlah migrasi masyarakat Tiongkok yang mayoritas pebisnis ke Sihanoukville sehingga, Sihanoukville disebut sebagai *China Town in Cambodia* atau Macau versi kedua.²¹

Dalam bidang politik, kehadiran investasi Tiongkok di Sihanoukville dianggap memicu maraknya korupsi, lemahnya supremasi hukum, serta sulitnya pemerintah untuk mengambil keputusan. Berdasarkan data dari *World Justice Project* (WJP), terdapat 113 negara yang telah disurvei dan Kamboja menduduki peringkat dua terbawah dalam hal kepatuhan terhadap supremasi hukum. Sejak tahun 2018, setidaknya ada 1.133 peretas Tiongkok yang dideportasi dari Kamboja akibat mencoba meretas situs web pemerintahan. Tak hanya itu, seiring dengan maraknya pembangunan *real estate* memicu terjadinya perampasan hak kepemilikan tanah warga lokal Kamboja oleh pejabat setempat yang telah bersekutu dengan pebisnis Tiongkok.²²

Dalam bidang sosial-budaya, meningkatnya kasus kekerasan seksual dan perdagangan manusia di Sihanoukville yang pelakunya adalah imigran Tiongkok dan korbannya adalah warga lokal Kamboja. Para pebisnis Tiongkok juga mulai menjamuri Sihanoukville dengan bisnis prostitusi, bisnis prostitusi dijalankan dengan cara membagikan selebaran layanan seks kepada publik. Tindakan para

²¹ Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", *China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal*, Vol.19, No. 4, 2019.

²² Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", *China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal*, Vol.19, No. 4, 2019.

pebisnis Tiongkok ini mendapatkan kecaman keras dari warga lokal karena pada dasarnya bisnis prostitusi ilegal secara hukum di Kamboja dan telah menyalahi budaya asli Kamboja. Tak hanya itu, pebisnis Tiongkok di Sihanoukville kerap hanya menggunakan bahasa Tionghoa dalam segala aspek bisnis mereka dan enggan untuk mempelajari bahasa, budaya, serta sejarah masyarakat Khmer.²³

Dalam bidang lingkungan, terjadi degradasi lingkungan yang cukup serius di Kamboja pasca investasi besar Tiongkok. Dimulai dari udara yang tercemar akibat polusi konstruksi bangunan, air laut yang tercemar akibat limbah pabrik, serta deforestasi hutan dalam rangka membangun destinasi wisata terbesar kedua setelah Angkor Wat yaitu, *Golden Silver Gulf Resort*. Penurunan kualitas lingkungan saat ini dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan Kamboja terhadap perubahan iklim di masa depan.²⁴

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk melihat dampak positif dan negatif dari investasi Tiongkok bagi negara penerimanya yaitu, Kamboja. Tulisan ini memaparkan dampak investasi Tiongkok bagi Kamboja di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lingkungan. Dampak positif dari investasi Tiongkok sangat terlihat jelas dalam bidang ekonomi namun, dalam bidang politik, sosial-budaya, dan lingkungan investasi Tiongkok cenderung dinilai berdampak negatif bagi Kamboja. Tulisan ini juga membantu penulis melihat apakah investasi Tiongkok dalam skema BRI

²³ Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", *China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal*, Vol.19, No. 4, 2019.

²⁴ Sovinda Po and KimKong Heng, "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province", *China-Cambodia Relations Pacific Forum Journal*, Vol.19, No. 4, 2019.

di Sihanoukville sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan pihak Tiongkok saja.

Literatur ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sophal Ear dan Sigfrido Burgos dengan judul *China's Strategic Interests in Cambodia: Influence and Resources*. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang strategi Tiongkok untuk meningkatkan posisinya dalam dunia internasional, terutama di Kamboja. Tiongkok menilai Kamboja memiliki beberapa aspek potensial yang kemudian menjadi motivasi bagi Tiongkok untuk memperkuat posisinya di Kamboja. Telah berevolusi menjadi salah satu aktor penting dalam dunia internasional membuat Tiongkok secara terus menerus ingin meningkatkan hegemoninya. Melalui kebijakan BRI, Tiongkok berencana untuk memaksimalkan akses pasar luar negeri serta mengamankan energi dan sumber daya yang ada.²⁵

Asia Tenggara memiliki signifikansi yang besar dalam dunia internasional karena berbagai alasan politik, ekonomi, sosial, dan geostrategis. Asia Tenggara terletak di persimpangan jalur perdagangan utama antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini membuatnya menjadi wilayah penting dalam hal perdagangan, pelayaran, dan komunikasi internasional. Selain itu, Asia Tenggara juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, logam, hasil hutan, dan hasil pertanian. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dari tahun ke tahun. Potensi pasar yang besar serta pertumbuhan industri yang semakin pesat menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat investasi asing langsung. Beberapa negara adidaya seperti AS, China, Uni Eropa, dan

²⁵ Sophal Ear and Sigfrido Burgos, '*China's Strategic Interests in Cambodia: Influence and Resources*', University of California Press, Vol. 1, No. 1, 2019.

Jepang menaruh minat besar di Asia Tenggara. Wilayah ini menjadi arena persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar tersebut yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi regional.²⁶

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk melihat apa saja kepentingan Tiongkok di Kamboja serta melihat apa saja strategi Tiongkok untuk mencapai kepentingannya tersebut. Tulisan ini memaparkan bagaimana ambisi Tiongkok untuk terus menerus meningkatkan hegemoninya dalam dunia internasional melalui penanaman *soft power* di negara-negara berkembang terutama di negara-negara yang tergabung dalam proyek besar BRI seperti, Kamboja. Tulisan ini juga membantu penulis melihat instrumen *soft power* yang cenderung digunakan Tiongkok yaitu melalui perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri.

Literatur keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kim Kong Heng dengan judul *Cambodia and China's Belt and Road Initiative: Opportunities, Challenges, and Future Directions*. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan arah masa depan Kamboja pasca keikutsertaannya dalam proyek besar BRI.²⁷

Menurut Heng, hubungan antara Tiongkok dan Kamboja sudah berjalan sangat jauh serta kedua negara sudah menganggap satu sama lain sebagai sahabat dekat. Sebagai negara berkembang, Kamboja memperoleh manfaat besar dari BRI seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan skala *Foreign Direct Investment (FDI)*, serta konektivitas internasional. Namun, Kamboja juga dihadapkan dengan

²⁶ Sopal Ear and Sigfrido Burgos, '*China's Strategic Interests in Cambodia: Influence and Resources*', University of California Press, Vol. 1, No. 1, 2019.

²⁷ KimKong Heng, '*Cambodia and China's Belt and Road Initiative: Opportunities, Challenges and Future Directions*', University of Cambodia, Vol. 2, No. 2, 2017.

beberapa tantangan seperti kemungkinan Kamboja akan terlilit utang dengan Tiongkok, ketergantungan terhadap Tiongkok, pengaruh Tiongkok semakin besar di Kamboja, sulit bagi Kamboja dalam mengambil kebijakan luar negeri, degradasi lingkungan, serta ketegangan hubungan antara Kamboja dengan AS dan negara-negara ASEAN lainnya.²⁸

Artikel jurnal ini juga mencoba melihat dari perspektif negara lain yang juga menerima bantuan luar Tiongkok melalui BRI yaitu, Sri Lanka. Bantuan luar negeri Tiongkok dalam skema BRI telah mendapatkan kritik internasional. Bantuan luar negeri skala besar Tiongkok dikhawatirkan akan menyebabkan jebakan utang bagi negara-negara penerimanya. Sama halnya seperti Kamboja, Sri Lanka juga merupakan salah satu negara yang tergabung dalam proyek BRI. Berdasarkan pengalaman Sri Lanka, Sri Lanka terpaksa harus mengeluarkan kebijakan untuk mengubah kekayaan negara menjadi ekuitas untuk melunasi utang ke Tiongkok. Sejauh ini, Sri Lanka telah memberikan kendali atas Pelabuhan Hambantota dan Bandara Mattala kepada Tiongkok selama 99 tahun.²⁹

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk melihat bagaimana peluang, tantangan, dan arah masa depan Kamboja pasca keikutsertaannya dalam proyek besar BRI. BRI merupakan sebuah dilema bagi Kamboja yang mana, BRI memberikan peluang bagi Kamboja untuk bertumbuh secara ekonomi namun juga, menghadirkan tantangan yang kompleks. Tulisan ini juga membantu penulis melihat langkah apa yang akan dilakukan oleh Kamboja

²⁸ KimKong Heng, "Cambodia and China's Belt and Road Initiative: Opportunities, Challenges and Future Directions", University of Cambodia, Vol. 2, No. 2, 2017.

²⁹ KimKong Heng, "Cambodia and China's Belt and Road Initiative: Opportunities, Challenges and Future Directions", University of Cambodia, Vol. 2, No. 2, 2017.

untuk menentukan arah masa depan negaranya dibawah pengaruh investasi Tiongkok agar tidak bernasib sama dengan Sri Lanka.

Literatur kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sara Lengauer dengan judul *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara saat ini, termasuk Tiongkok. Bantuan luar negeri Tiongkok telah memiliki dampak yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi salah satu negara donor dengan bantuan terbesar di dunia melalui kebijakan BRI yang bertujuan untuk membangun konektivitas infrastruktur dan perdagangan Tiongkok secara global. Menurut Lengauer, prioritas utama dari kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini adalah untuk membentuk *nation image* serta memperkuat kedudukan Tiongkok di dunia internasional. Walaupun, Tiongkok senantiasa berfokus memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara miskin dan berkembang namun, Tiongkok tetap mempertimbangkan segala kepentingan nasionalnya disana karena Tiongkok memiliki kepentingan yang berbeda pada tiap negara dan tiap kawasan.³⁰

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk melihat bagaimana Tiongkok menggunakan bantuan luar negerinya sebagai instrumen penting untuk mencapai kepentingannya di dunia internasional. Dengan memberikan bantuan luar negeri ke berbagai negara dan kawasan Tiongkok dapat memperkuat posisinya di dunia internasional dan Tiongkok akan semakin mudah dalam mencapai kepentingannya.

³⁰ Sara Lengauer, "*China's foreign aid policy: Motive and method*", The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol. 9, No. 2, 2011.

1.7 Kerangka Konsep

Penggunaan konsep atau teori sangat diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat serta untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model*.

1.7.1 *Foreign Aid and Donor Interest Model*

Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of International Relations* mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif kaya atau maju kepada negara miskin atau berkembang.³¹ K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *International Politics: Framework of Analysis* mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima.³² Carol Lancaster dalam bukunya *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai perpindahan sumber daya secara sukarela dari satu negara ke negara lain, baik itu dalam bidang ekonomi maupun militer.³³

Dalam hubungan internasional, setiap negara akan saling membutuhkan negara lain untuk *survive*. Hal ini disebut sebagai hubungan saling ketergantungan atau interdependensi. Ketergantungan antar negara tersebut semakin erat seiring dengan globalisasi dan banyaknya kerjasama yang lahir. Kerjasama era ini juga

³¹ Robert Gilpin, *"The Political Economy of International Relations"*, New Jersey: Princeton University Press, 1987, hal. 311.

³² K.J Holsti, *"International Politics A Framework for Analysis 6th Edition"*, New Jersey: Prentice Hall, 1995, hal. 192.

³³ Carol Lancaster, *"Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics"*, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, hal. 5-6.

telah merambah kepada kebutuhan akan bantuan luar negeri.³⁴ Bantuan luar negeri (*Foreign Aid*) merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) yang sering digunakan dalam kerjasama internasional guna untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua cara pemberian bantuan luar negeri. Pertama, negara donor dapat memberikan bantuan luar negeri secara langsung melalui kerangka kerjasama bilateral, seperti halnya bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*. Kedua, negara donor dapat memberikan bantuan luar negeri melalui kerjasama multilateral atau melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund (IMF)*, dan World Bank.³⁵

Ketika suatu negara memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain tentu saja terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapainya disana. Pengalokasian bantuan luar negeri akan selalu beracuan kepada kepentingan nasional negara donor di negara penerima yang biasanya kedua negara cenderung memiliki hubungan dekat. Keputusan untuk mengeluarkan bantuan luar negeri tidak akan terlepas dari arah kebijakan luar negeri negara donor, hampir semua bantuan luar negeri yang bersifat bilateral ditentukan atas dasar pertimbangan politik, militer, dan ekonomi dari negara donor di negara penerima. Jika ditinjau dari perspektif negara donor, maka bantuan luar negeri sejatinya adalah instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk melakukan hubungan diplomatik

³⁴ Jenny Wells, "Foreign Aid and Its Importance in Relieving Poverty", *Foreign Aid GeoDate*, Vol. 28, No.3, 2015.

³⁵ Louis Picard, "Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half Century", New York: M.E. Sharpe, 2008, hal. 12.

dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingan serta untuk meningkatkan eksistensi negara donor di dunia internasional.³⁶

Pada penelitian ini, dapat digunakan konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model* yang dikemukakan oleh Alfred Maizels and Machiko Nissanke dalam jurnal yang berjudul *Motivations for Aid to Developing Countries*. Maizels dan Nissanke menjelaskan bahwa kepentingan nasional dapat direalisasikan melalui bantuan luar negeri. Dalam aspek internasional, bantuan luar negeri dapat mewakili kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai bagaimana suatu negara bersikap dalam dunia internasional. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional untuk menjaga eksistensinya dalam dunia internasional. Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan atau ambisi suatu negara terhadap aspek-aspek seperti politik, keamanan, dan ekonomi. Kepentingan nasional juga merupakan landasan bagi suatu negara dalam berinteraksi dan menginisiasi kerjasama dengan negara lain karena bantuan luar negeri suatu negara harus berorientasi kepada kepentingan nasional. Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa untuk melihat kepentingan nasional suatu negara pada dasarnya dapat dikelompokkan melalui beberapa aspek yaitu kepentingan politik dan keamanan, kepentingan investasi, serta kepentingan perdagangan.³⁷

³⁶ Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, hal. 7-9.

³⁷ Alfred Maizels and Machiko Nissanke, *Motivations for Aid to Developing Countries*, World Development, Vol. 12, No. 9, 1984.

a. *The Political and Security Interest*

Bantuan luar negeri sering kali dijadikan sebagai instrumen utama untuk mencapai kepentingan politik dan kepentingan keamanan oleh negara donor. Kepentingan politik dan keamanan dari negara donor terhadap negara penerima dapat dilihat melalui perjanjian pertahanan, pembangunan markas militer, pembentukan asosiasi militer, maupun bantuan persenjataan. Dalam konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model*, negara donor cenderung akan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara dimana negara donor tersebut memiliki kepentingan terkait isu keamanan. Namun, bantuan luar negeri tersebut seringkali disebut hanya sebagai bantuan pembangunan dan bukan upaya dalam pencapaian kepentingan politik dan keamanan dari negara donor. Kepentingan politik negara donor cenderung dikaitkan dengan upaya mempromosikan kebijakan luar negeri maupun ideologinya untuk memperoleh kekuasaan dan kendali atas institusi di negara penerima. Sedangkan, kepentingan keamanan negara donor cenderung dikaitkan dengan upaya untuk mengamankan wilayah, pembentukan aliansi, dan peningkatan kekuatan militer. Dengan memberikan bantuan luar negeri skala besar secara otomatis negara donor akan memiliki pengaruh besar di negara penerima.³⁸

b. *The Investment Interest*

Kepentingan investasi dari negara donor terhadap negara penerima dapat dilihat melalui investasi dan penanaman modal skala besar yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima yang mayoritas merupakan negara berkembang. Skala investasi dapat

³⁸ Alfred Maizels and Machiko Nissanke, "Motivations for Aid to Developing Countries", *World Development*, Vol. 12, No. 9, 1984.

dijadikan sebagai indikator yang menentukan seberapa besar dan seberapa banyak kepentingan negara donor di negara penerima. Semakin besar skala investasi maka semakin besar kesempatan akses yang diperoleh negara donor di negara penerima. Dengan melakukan investasi skala besar di negara penerima, negara donor cenderung berharap akan mendapatkan keuntungan berkelanjutan karena target investasi biasanya adalah bidang infrastruktur dan perusahaan transnasional.³⁹

c. *Trade Interest*

Ekonomi dan perdagangan merupakan aspek krusial dalam dunia internasional dewasa ini karena ekonomi dan perdagangan dapat menjadi instrumen *soft power* bagi suatu negara. Ekonomi dan perdagangan dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara oleh karena itu ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam mengambil kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga dalam penyusunan kebijakan luar negeri, ekonomi dan perdagangan merupakan hal vital yang tidak boleh diabaikan oleh suatu negara. Kepentingan ekonomi dan perdagangan dari negara donor di negara penerima dapat dilihat dari skala ekspor-impornya. Negara donor cenderung memberikan bantuan luar negeri kepada negara mitra dagang utamanya. Negara donor cenderung menargetkan negara-negara berkembang yang potensial sebagai mitranya dan letak geografis masih menjadi pertimbangan utama.⁴⁰

³⁹ Alfred Maizels and Machiko Nissanke, "Motivations for Aid to Developing Countries", World Development, Vol. 12, No. 9, 1984.

⁴⁰ Alfred Maizels and Machiko Nissanke, "Motivations for Aid to Developing Countries", World Development, Vol. 12, No. 9, 1984.

Ketiga indikator dari kerangka konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model* diatas memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat. Konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model* akan menjelaskan kepentingan dari bantuan luar negeri negara donor di negara penerima. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dilihat apa kepentingan Tiongkok atas bantuan luar negerinya di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

1.8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang dijalankan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam studi hubungan internasional, metodologi penelitian akan digunakan sebagai serangkaian prosedur untuk menjabarkan bagaimana fenomena hubungan internasional bisa terjadi.⁴¹

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dengan cara yang mudah dipahami melalui penerapan konsep sesuai dengan fenomena yang terjadi. Sederhananya, penelitian kualitatif ini akan beracuan pada fakta-fakta lapangan yang bersifat naratif dan bukan angka. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis akan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena tidak hanya secara naratif tetapi juga terdapat analisis didalamnya seperti, perilaku dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara.⁴² Alasan peneliti memilih jenis

⁴¹ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", 1994.

⁴² John Creswell and David Creswell, "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", Sage Publications Inc: United States of America, 2018, hal. 162.

penelitian ini agar dapat menjelaskan apa kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Peneliti telah menetapkan tahun 2019 sampai saat ini sebagai tahun batasan dari penelitian ini. Rentang waktu ini dipilih karena pada tahun 2019 merupakan awal mula inisiasi *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)* dan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja meningkat secara signifikan. Banyak pembangunan baru skala besar yang dilakukan di Sihanoukville serta telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Sedangkan rentang waktu sampai saat ini dipilih karena pembangunan di SSEZ masih akan terus berlanjut dan akan mengalami perkembangan.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diteliti dalam sebuah penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah bantuan luar negeri Tiongkok. Peneliti berfokus untuk melihat apa kepentingan dari bantuan luar negeri skala besar yang dialokasikan oleh Tiongkok. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Oleh karena itu, unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*, terkait bantuan luar negeri yang diterimanya dari Tiongkok.

⁴³ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", 1994.

Dalam studi hubungan internasional menurut John Spanier terdapat tiga level analisis yaitu sistem, negara-bangsa, dan individu. Dalam penelitian ini, level analisisnya berada pada level sistem karena peneliti menjelaskan hubungan dua negara yaitu, Tiongkok dan Kamboja serta implikasinya terhadap suatu kawasan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini. Sumber yang mendukung tersebut seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi, website pemerintahan, serta portal berita resmi.

Adapun sumber-sumber data yang diperoleh dari buku dengan judul *Motivations for Aid to Developing Countries, Foreign Aid: Diplomacy, Development, and Domestic Politics, China's Foreign Aid Policy: Motive and Method, Chinese Investments in Cambodia: View of Chinese Soft Power from the Ground Up, The Political Economy of International Relations, International Politics A Framework for Analysis 6th Edition, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, dan Basic of Qualitative Research*. Lebih lanjut, adapun data-data yang ada diperoleh dari jurnal ilmiah terbitan *Lowy Institute For International Policy, IOSR Journal, Journal China's World, Journal International Policy Center, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Journal of Indo-Pacific, Journal Asia Pacific Studies, Journal Cambodian Institute, Journal Geneva Centre for Security Policy (GCSP),*

International Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Research, dan *Journal International Economic and Security*. Portal berita resmi juga digunakan dalam pengumpulan data seperti, *The Diplomat*, *New York Times*, *Washington Post*, *USC US-China Institute*, BBC, CNN, *ASEAN Today*, dan *Phnom Penh Post*. Terakhir data-data yang ada diperoleh juga dari website resmi terkait Sihanoukville Kamboja yaitu, ssez.com.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses penyusunan data oleh peneliti guna untuk memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan penelitian secara logis dan sistematis. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini berangkat dari pemikiran Matthew Miles dan Michael Huberman yang menjelaskan tahapan analisis data sebagai berikut :⁴⁴

a. Reduksi Data

Pada tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian akan direduksi dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data sendiri merupakan sebuah proses seleksi yang memusatkan, menyederhanakan, serta melakukan transformasi terhadap data yang ada di berbagai tulisan yang dijadikan sebagai referensi. Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data berdasarkan fokus penelitian melalui beberapa kata kunci seperti Tiongkok, Kamboja, *Belt and Road Initiative (BRI)*, Sihanoukville, *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*, dinamika hubungan Tiongkok-Kamboja, dan lain-lain. Penggunaan kata kunci dapat memudahkan

⁴⁴ Matthew Miles and Michael Huberman, "*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Second Edition*", United States of America: SAGE Publications, 1994, hal. 11.

peneliti mereduksi data agar memperoleh data yang relevan dengan skop penelitian yang telah ditentukan.

b. Penyajian Data

Pada tahapan ini, data dan informasi yang sudah didapat kemudian akan dilakukan penyusunan. Penyajian data sendiri merupakan sebuah proses pengorganisasian serta meringkas kumpulan data yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, kumpulan data yang diperoleh dari tahapan reduksi data akan disajikan dalam bentuk uraian berupa teks naratif, grafik, maupun bagan terkait dengan kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan proses akhir dalam analisis data yang mana mencakup kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Kemudian data tersebut akan memperkuat tulisan dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dimudahkan dengan adanya pengkategorian data yang sudah disajikan sehingga terlihat apa kepentingan dari bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)*.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Hal ini menjadi landasan dan gambaran besar dari penelitian ini sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan dasar terkait penelitian ini.

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN TIONGKOK DAN KAMBOJA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai beberapa hal, mulai dari sejarah hubungan Tiongkok dan Kamboja, dinamika hubungan kerjasama Tiongkok dan Kamboja sebelum inisiasi kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)*, serta dinamika hubungan kerjasama Tiongkok dan Kamboja setelah inisiasi kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)*.

BAB III BANTUAN LUAR NEGERI TIONGKOK DI SIHANOUKVILLE KAMBOJA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai bantuan luar negeri skala besar Tiongkok di Sihanoukville Kamboja yang mana pembahasan ini akan memberikan penulis gambaran terkait bantuan dan investasi apa saja yang diberikan Tiongkok kepada Kamboja di Sihanoukville.

**BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN BANTUAN LUAR NEGERI
TIONGKOK DI KAMBOJA MELALUI *SIHANOUKVILLE
SPECIAL ECONOMIC ZONE (SSEZ)***

Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis apa kepentingan dari bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui *Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)* menggunakan kerangka konsep yang telah dipilih oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian dimana akan dipaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab sebelumnya dan juga terdapat saran bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini agar lebih baik.

